



BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA



BUKU PROFIL 2021

Sekapur Sirih

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Buku Profil BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Materi dalam Buku Profil Tahun 2021 ini adalah potret BPK, khususnya Perwakilan Provinsi DKI yang memuat tentang sejarah, tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan kinerja organisasi dalam rangkaian kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Selain informasi tersebut buku ini juga menyajikan tentang informasi mengenai profil dan cakupan pemeriksaan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan informasi penting lainnya, yang terkait dengan serangkaian kegiatan di lingkungan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Kami menyadari bahwa buku profil yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan untuk penyempurnaan buku profil selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dari proses penyusunan hingga proses penerbitan buku ini.

Akhir kata, semoga buku profil ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Perwakilan

Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	i
Daftar Isi	ii
Sejarah dan Profil BPK RI.....	1
Dasar Hukum BPK RI.....	3
Arti dan Makna Lambang BPK RI.....	4
Hymne dan Mars BPK RI.....	5
Renstra BPK RI 2020 – 2024	6
Profil Anggota BPK RI	8
Profil BPK Perwakilan DKI Jakarta	
Sejarah.....	10
Tugas dan Fungsi	11
Kepala Perwakilan dari masa ke masa	12
Struktur Organisasi.....	13
Profil Kepala Perwakilan.....	14
Subauditorat DKI Jakarta I.....	15
Subauditorat DKI Jakarta II.....	17
Subauditorat DKI Jakarta III.....	19
Subauditorat DKI Jakarta IV.....	21
Sekretariat Perwakilan	23
Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan	25
Subbagian Sumber Daya Manusia.....	26
Subbagian Keuangan	27
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi.....	28
Subbagian Hukum	29
Subbagian Hubungan Masyarakat	30
Informasi SDM di BPK Perwakilan.....	31
Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	33
Capaian IKU Tahun 2021	34

Sarana Prasarana BPK Perwakilan.....	35
Informasi Pemeriksaan BPK DKI Jakarta	37
Hasil Pemeriksaan LKPD DKI Jakarta	38
Daftar Pemeriksaan Tahun 2021.....	39
Profil Entitas Pemeriksaan: Pemerintah Daerah DKI Jakarta.....	40
PD Air Minum Jaya	41
PT Bank DKI	42
PD Pasar Jaya.....	43
PD Pembangunan Sarana Jaya	44
PD PAL Jaya	45
PD Dharma Jaya.....	46
PT Jakarta Propertindo (JakPro).....	47
PT Jakarta Tourisindo (JakTour)	48
PT Food Station Tjipinang Jaya.....	49
PT Pembangunan Jaya Ancol.....	50
PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT).....	51
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	52
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta)	53
PT Jamkrida Jakarta	54
Penghargaan yang Telah Diraih.....	55
Dokumentasi Kegiatan BPK Perwakilan DKI Jakarta	56

Sejarah dan Profil BPK RI

----- 1 Januari 1947 - Awal Pembentukan -----



Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

----- 6 November 1948 - Kedudukan di Yogyakarta -----

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

----- 14 Desember 1949 - Dewan Pengawas Keuangan -----

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

----- 1 Oktober 1950 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950) -----

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.



----- 5 Juli 1959 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945) -----

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

----- 12 Oktober 1963 - PERPU No. 6 Tahun 1964 -----

Dalam amanat-amatan Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

----- UU No. 5 Tahun 1973 - Badan Pemeriksa Keuangan -----

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

----- TAP MPR No.VI/MPR/2002 - Independen dan Profesional -----

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Dasar Hukum BPK RI

PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BAB VIIIA - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23 F

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23 G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Untuk menunjang tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, BPK RI juga didukung oleh beberapa Undang-Undang, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Arti dan Makna Lambang BPK RI



Garuda Pancasila melambangkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas negara republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

Motif Cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka. Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan

Pemeriksa Keuangan yang melambangkan alat bagi bangsa Indonesia untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selalu tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan dan perundangan;
- b. Pemeriksaan atas daya guna (efisien dan kehematan) ekonomi; dan
- c. Pemeriksaan atas hasil program (efektivitas).

Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung kecil pada sisi bagian luar Cakra melambangkan tahun kelahiran BPK yaitu tahun 1947.

Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menopang Cakra merupakan "*Padmasana*" yang berarti tahta bunga teratai yang melambangkan kesuburan lahir batin.

Makna Cakra ditopang oleh Bunga Teratai adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan Lembaga-lembaga Tinggi lainnya sehingga memberikan jaminan terhadap independensi dalam setiap kegiatan.

Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan pada kode etik SaptaPrasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah tujuh butir. Warna lambang Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara, sementara warna putih pada kelopak bunga Teratai mempunyai makna kesucian, kebersihan dan kejujuran.

Hymne dan Mars BPK RI

Hymne BPK RI

Kami Sang Abdi Negara
Mengembang Tugas Mulia
Untuk Tanah Air Tercinta
Demi Bangsaku Indonesia

Kami Siap Jiwa dan Raga
Mengabdi Untukmu Negara
Tegar Takkan Pernah Gentar
Menjaga Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila

Kami Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Bersumpah Dengan Hati Yang Kuat
Selalu Ada Untukmu Indonesia

(kembali ke #)

Mars BPK RI

Wahai Sang Abdi Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Hayatilah dan Amalkan Pengabdianmu

Dengan Menjunjung Tinggi Independensi
Integritas dan Profesionalisme
Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung
Jawab
Keuangan Negara

Demi Bangsaku Indonesia
Tanah Air Tercinta
Kami Siap Jiwa dan Raga
Mengabdi Untuk Negara

Tegar
Takkan Gentar
Menjaga Mengayomi Harta Negara
Dengan Semangat Pancasila

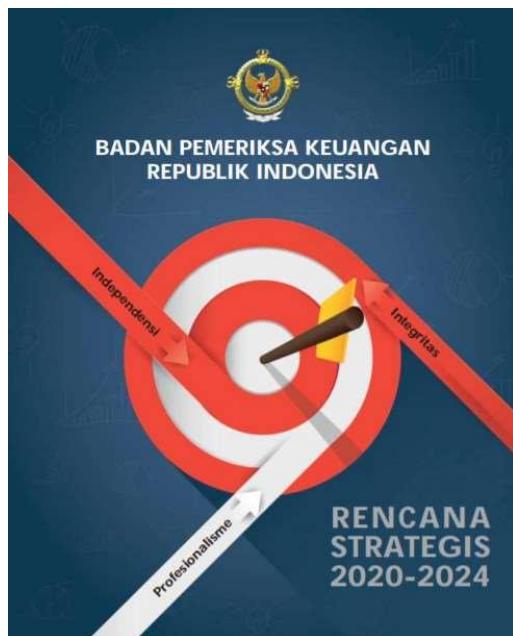
(kembali ke #)

Rencana Strategis BPK 2020 – 2024

Renstra BPK 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Renstra BPK 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK. Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurnya.

Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK 2020–2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.



(klik [di sini](#) untuk mengunduh Renstra BPK RI 2020-2024)

**BPK RI**BANDAR PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

Tujuan

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Misi

Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan

Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara

Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi

NILAI DASAR

INTEGRITAS

KAMI MEMBANGUN NILAI INTEGRITAS DENGAN BERSIKAP JUJUR, OBYEKTIIF, DAN TEGAS DALAM MENERAPKAN PRINSIP, NILAI, DAN KEPUTUSAN.

INDEPENDENSI

KAMI MENJUNJUNG TINGGI INDEPENDENSI, BAIK SECARA KELEMBAGAAN, ORGANISASI, MAUPUN INDIVIDU. DALAM SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN, KAMI BEBAS DALAM SIKAP MENTAL DAN PENAMPILAN DARI GANGGUAN PRIBADI, EKSTERN, DAN/ATAU ORGANISASI YANG DAPAT MEMPENGARUHI INDEPENDENSI.

PROFESIONALISME

KAMI MEMBANGUN NILAI PROFESIONALISME DENGAN MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, KETELITIAN, DAN KECERMATAN, SERTA BERPEDOMAN KEPADA STANDAR YANG BERLAKU.

Profil Anggota BPK RI



KETUA BPK

*Dr. Agung Firman
Sampurna, CSFA., CFrA.,
CGCAE*



WAKIL KETUA BPK

*Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA., CSFA.,
CPA., CFrA*



ANGGOTA I BPK

*Dr. Hendra Susanto, S.T.,
M.Eng., M.H., CFrA., CSFA*



ANGGOTA II BPK

*Dr. Pius Lustrilanang,
S.IP., M.Si., CFrA., CSFA*



ANGGOTA III BPK

*Dr. Achsanul Qosasi,
CSFA., CFrA*



ANGGOTA IV BPK

*Dr. Isma Yatun, CSFA.,
CFrA.*



ANGGOTA V BPK

*Prof. Harry Azhar Azis,
M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.*



ANGGOTA VI BPK

*Nyoman Adhi
Suryadnyana, S.E., M.E.,
CSFA.*



ANGGOTA VII BPK

*Ir. Daniel Lumban Tobing,
CSFA., CFrA.*



PROFIL BPK PERWAKILAN

PROVINSI DKI JAKARTA



Sejarah



BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terbentuk berawal dari Satuan Kerja Auditorat IV yang dipimpin oleh Drs. A. Th. Sutedjo, MM., yang kemudian digantikan oleh Drs. Rusmantyo. Berdasarkan SK BPK RI No No. 16/SK/K//1996 tanggal 15 Agustus 1996, Auditorat IV berubah menjadi Perwakilan Khusus Jakarta, yang berkedudukan di Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat.

Selanjutnya berdasarkan SK BPK RI No. 12/SK/I-VIII.3/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK

RI, terbentuklah Perwakilan III BPK RI di Jakarta yang berkantor di Jalan MT Haryono Kav. 45-46 Jakarta Selatan. Perwakilan III BPK RI di Jakarta membawahi Sekretariat Perwakilan III BPK RI di Jakarta, Sub Auditorat Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditorat Depdagri dan Jawa Barat IV, dan Sub Auditorat Jawa Barat I, II, dan III.

Kemudian berdasarkan SK BPK RI No. 02/SK/I-VIII.3/1/2006 tanggal 5 Januari 2006, nama Perwakilan III BPK RI di Jakarta diubah menjadi Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, membawahi Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditorat Provinsi Jakarta, Sub Auditorat Depdagri dan Banten.

Berdasarkan SK Ketua BPK RI No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta akan membawahi Sub Auditorat DKI Jakarta I, Sub Auditorat DKI Jakarta II, Sub Auditorat DKI Jakarta III, Sub Auditorat DKI Jakarta IV, dan Sekretariat Perwakilan.

Peresmian penggunaan gedung kantor Perwakilan III BPK RI Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Bapak Ketua BPK RI, Prof. Dr. Anwar Nasution. pada tanggal 27 September 2005. Bertempat di Gedung BPM & PKUD Jl. MT. Haryono kav. 45-46 lantai 3 dan 4 Pancoran – Jakarta Selatan 12770, gedung tersebut berstatus pinjam pakai dengan perjanjian pinjam pakai no. 7/AK/BP/V/2007 antara BPK RI dengan Pemda DKI Jakarta.

Selanjutnya pada Bulan Desember 2009 Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI pindah ke Jalan MT Haryono Kavling 34 Jakarta Selatan dengan luas bangunan 17.473 m², terdiri dari 15 lantai dengan 2 tempat parkir di bawah tanah yang diresmikan oleh Ketua BPK RI, Bapak Hadi Poernomo pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2009.



Tugas dan Fungsi

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada anggota V BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database Entitas Pemeriksaan* pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa



RUSMANTOYO
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2001 – 2004



HADI PRIYANTO
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2004 - 2007



I GEDDE KASTAWA
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2007 - 2009



SJAFRUDIN MOSII
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2009 - 2010



BLUCER W. RAJAGUKGU
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2010 - 2014



EFDINAL
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2014 - 2015



SYAMSUDIN
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2015 - 2018



YUAN CANDRA DJAISIN
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2018 - 2019



PEMUT ARYO WIBOWO
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2020 – 2021



DEDE SUKARJO
KEPALA PERWAKILAN
PERIODE 2021 – SAATINI



STRUKTUR ORGANISASI

BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA



Profil Kepala Perwakilan



Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

Tempat, Tanggal Lahir: Cihaurbeuti, 18 April 1972

Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Indonesia

Lahir di Cihaurbeuti tahun 1972, Dede Sukarjo atau yang biasa dipanggil Dede, menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sejak September 2021. Lulusan S2 Manajemen dari Universitas Indonesia ini juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Auditorat V.A sejak tahun 2019 silam. Selain itu, beliau juga telah mendapatkan sertifikasi CSFA (*Certified State Finance Auditor*) yang merupakan sertifikasi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga memang beliau ini merupakan orang yang sangat kompeten di bidangnya.

Sebagai seorang Kepala Perwakilan, beliau memiliki tanggung jawab untuk memimpin BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya, yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta serta melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan juga Auditorat Utama Investigasi.



Subauditorat DKI I



Kepala Subauditorat DKI I
Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak.

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 13 Januari 1967
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Padjajaran

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Subauditorat DKI I adalah:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat DKI I membawahi entitas objek pemeriksaan sebagai berikut:

- 1. Gubernur dan Sekretariat Daerah;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD;
- 3. Inspektorat;
- 4. Kota Administratif Jakarta Utara;
- 5. Kota Administratif Jakarta Pusat;
- 6. Kota Administratif Jakarta Timur;
- 7. Kota Administratif Jakarta Barat;
- 8. Kota Administratif Jakarta Selatan;
- 9. Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu;
- 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 14. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 15. Badan Pengelola Aset Daerah;
- 16. Badan Kepegawaian Daerah;
- 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 18. Satuan Polisi Pamong Praja.

Subauditorat DKI II



Kepala Subauditorat DKI II
Sri Haryati, S.E., M.M.

Tempat, Tanggal Lahir: Kroya, 6 September 1969
Pendidikan Terakhir: S3 IPDN

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Subauditorat DKI II adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat DKI II membawahi entitas pemeriksaan berikut:

- 1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- 3. PT Bank DKI;
- 4. PD Pasar Jaya;
- 5. PT Pembangunan Jaya Ancol;
- 6. PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;
- 7. PD Dharma Jaya;
- 8. PT Food Station Tjipinang Jaya;
- 9. PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta);
- 10. PT Jakarta Tourisindo;
- 11. PT Jakarta Propertindo;
- 12. PT Transportasi Jakarta;
- 13. PT Pembangunan Sarana Jaya;
- 14. PD PAM Jaya;
- 15. PD PAL Jaya;
- 16. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP);
- 17. BLUD.



Subauditorat DKI III



Kepala Subauditorat DKI III
Hari Fitrianto, S.E., M.Bus., Ak., CFE., CA.

Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 10 Desember 1969
Pendidikan Terakhir: S2 University of South Australia

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Subauditorat DKI III adalah:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat DKI III melaksanakan pemeriksaan terhadap entitas di bawah ini, yaitu:

- 1. Dinas Pendidikan;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. Dinas Sumber Daya Air;
- 4. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 6. Dinas Perindustrian dan Energi;
- 7. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
- 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Subauditorat DKI IV



Kepala Subauditorat DKI IV
Dr. Wahyudi, S.E., M.Ak., CA., ACPA., CPA.

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 17 Mei 1973
Pendidikan Terakhir: S3 Universitas Indonesia

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Subauditorat DKI IV adalah:

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat DKI IV melaksanakan pemeriksaan terhadap entitas di bawah ini, yaitu:

- 1. Dinas Bina Marga
- 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 4. Dinas Sosial
- 5. Dinas Lingkungan Hidup
- 6. Dinas Perhubungan
- 7. Dinas Kehutanan
- 8. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- 9. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 10. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Sekretariat Perwakilan



Kepala Sekretariat Perwakilan
Dandy Handoza S.T., M.T.

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 14 November 1981
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Indonesia

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Perwakilan menjalani fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan



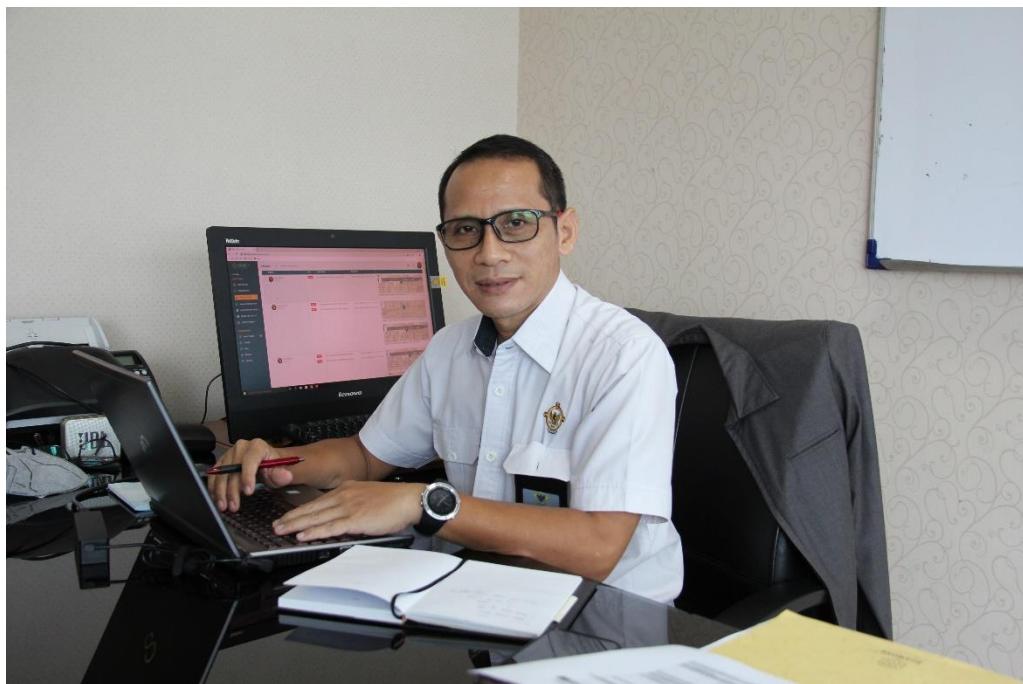
Kepala Subbagian TU Kalan
Dudy Hamzah, S.Kom., M.Si.

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 5 Mei 1972
Pendidikan Terakhir : S2 STIA YAPPANN

Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sementara tugas kesekretariatan yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Kantor Perwakilan dengan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta melakukan penatausahaan dan membantu kelancaran administrasi Kepala Perwakilan.



Subbagian Sumber Daya Manusia



Kepala Subbagian SDM
Surya Pujoyono S.T., M.T.

Tempat, Tanggal Lahir: Semarang, 20 Mei 1976
Pendidikan Terakhir: S2 Universitas Gadjah Mada

Subbagian Sumber Daya Manusia memiliki tugas melaksanakan pengurusan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Pewakilan.



Subbagian Keuangan



Kepala Subbagian Keuangan
Hery Kurniawan S.E.

Tempat, Tanggal Lahir: Ponorogo, 28 November 1980
Pendidikan Terakhir: S1 Universitas Airlangga

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Subbagian Umum dan Teknologi Informasi



Kepala Subbagian Umum & TI
Irvan Diary S.T.

Tempat, Tanggal Lahir: Medan, 24 September 1975
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Trisakti

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Subbagian Hukum



Kepala Subbagian Hukum
Awaluddin S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 24 November 1971
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Islam Indonesia

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Subbagian Hubungan Masyarakat



Kepala Subbagian Humas
Kautsar Aditya Wicaksana S.E.,MBA.

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 30 November 1983
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Gadjah Mada

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mengelola perpustakaan.



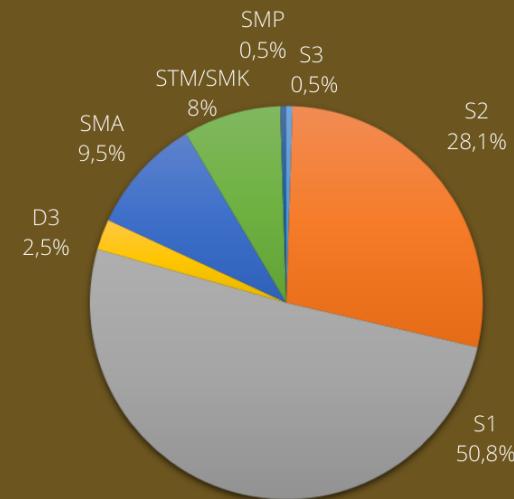
Informasi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



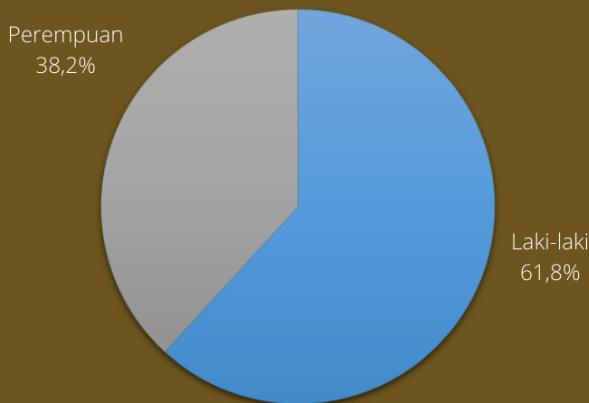
PNS = 160 orang
CPNS = 1 orang
Pegawai Tidak Tetap = 38 orang
Total = 199 orang

Pegawai Berdasarkan Pendidikan



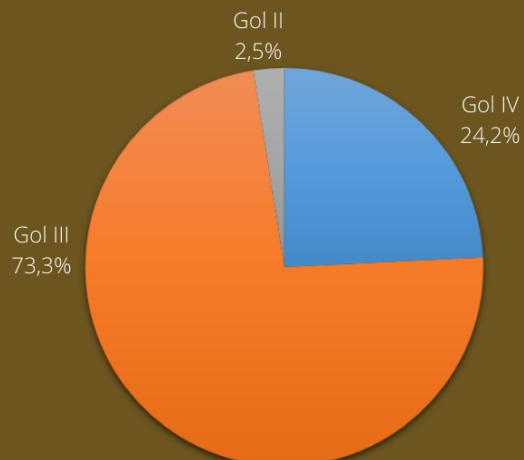
S3 = 1 orang
S1/D4 = 101 orang
SMA = 19 orang
SMP = 1 orang
S2 = 56 orang
D3 = 5 orang
STM/SMK = 16 orang

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Laki-laki = 123 orang
Perempuan = 76 orang

Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan

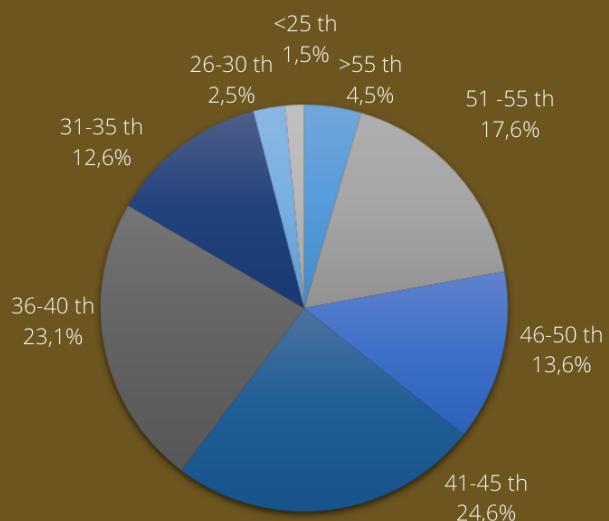


Gol IV = 39 orang
Gol III = 118 orang
Gol II = 4 orang



Informasi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Pegawai Berdasarkan Usia



>55 tahun = 9 orang

51-55 tahun = 35 orang

46-50 tahun = 27 orang

41-45 tahun = 49 orang

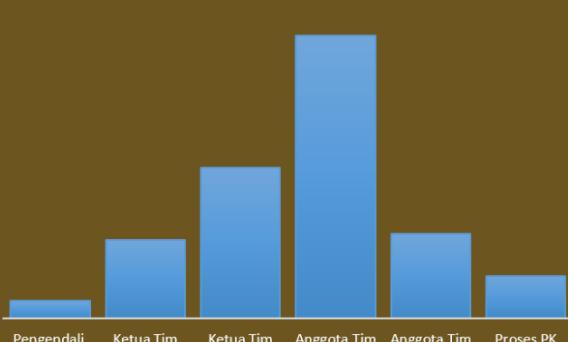
36 -40 tahun = 46 orang

31-35 tahun = 25 orang

26-30 tahun = 5 orang

<25 tahun = 3 orang

Pegawai Berdasarkan Peran Pemeriksa



Pengendali Teknis = 3 orang

Ketua Tim Senior = 13 orang

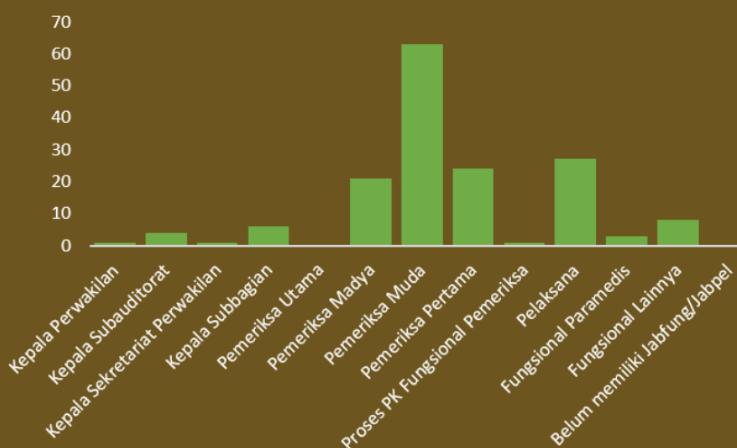
Ketua Tim Yunior = 25 orang

Anggota Tim Senior = 47 orang

Anggota Tim Yunior = 14

Proses PK = 7 orang

Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan



No	Jabatan	Jumlah	Percentase
1	Kepala Perwakilan	1	0,6%
2	Kepala Subauditorat	4	2,5%
3	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	0,6%
4	Kepala Subbagian	6	3,8%
5	Pemeriksa Utama	0	0,0%
6	Pemeriksa Madya	21	13,2%
7	Pemeriksa Muda	63	39,6%
8	Pemeriksa Pertama	24	15,1%
9	Proses PK Fungsional Pemeriksa	1	0,6%
10	Pelaksana	27	17,0%
11	Fungsional Paramedis	3	1,9%
12	Fungsional Lainnya	8	5,0%
13	Belum memiliki Jabfung/Jabpel	0	0,0%
JUMLAH			159 100,0%

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Keluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Bahan Rumusan Pendapat	2.100.000	2.093.000
Layanan Administrasi Pemeriksaan	872.935.000	870.053.924
Sumbangan IHPS	5.900.000	5.229.000
LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	7.641.334.000	7.584.505.618
Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	261.890.000	259.650.600
Laporan Profil Entitas	26.500.000	26.272.000
Layanan Sekretariat Perwakilan	1.518.307.000	1.512.109.863
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	2.467.000	2.467.000
LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1.305.616.000	1.299.350.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	891.524.000	887.696.490
Layanan Perkantoran	21.187.082.000	21.079.799.825
Total	<u>33.715.655.000</u>	<u>33.524.483.162</u>

Pencapaian Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemrolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90%	90
	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,65%	105
	4 Tingkat Pemenuhan Ketertiban Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,61%	100,61
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.	100%	100%	100
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,35%	100,35
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,41%	88,2
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	87,87%	101
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,90%	103,02
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,98%	104,74
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	99,38%	99,38
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	89,91%	102,75



Sarana dan Prasarana



Area Parkir



Masjid Baitul
Hasib



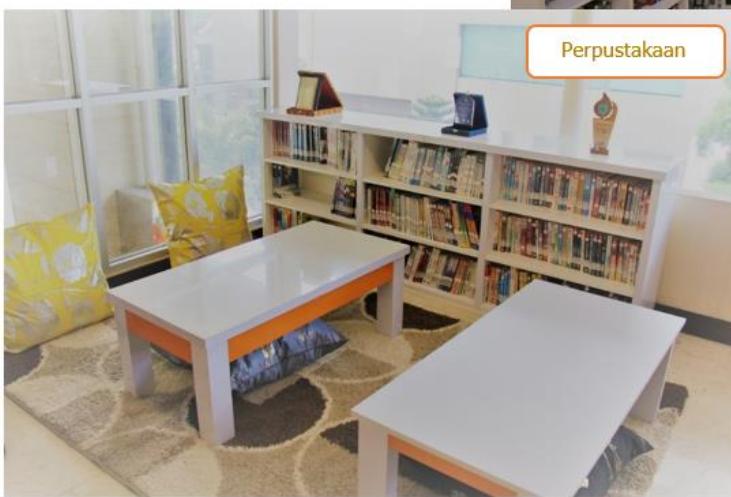
Ruang PIK



Kantin



Poliklinik (Umum dan Gigi)



Informasi Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan

Merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan Keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negara. Tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk di dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan pada suatu standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Pada awal tahun 2017, BPK berhasil menyempurnakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak berlakunya peraturan BPK tersebut, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Tahun Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
2020	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	2017	Wajar Dengan Pengecualian

Pemeriksaan Yang Telah Dilakukan Pada Tahun Anggaran 2021

No.	Hasil Pemeriksaan
1	Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
2	Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Unit Hunian yang Terjangkau dan Berkelaanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran (TA) 2018 s.d. TA 2020 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
3	Pemeriksaan Kepatuhan atas Aktivitas Operasional dan Penugasan pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
4	Pemeriksaan Kepatuhan atas kegiatan Operasional PT MRT Jakarta TB 2019,2020,2021 (Semester I) pada PT Mass Rapid Transit Jakarta
5	Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2020 s.d. Semester I TB 2021 pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
6	Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Prov DKI Jakarta TA 2020 dan Semester I TA 2021 pada Pemerintah Prov DKI Jakarta
7	Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
8	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan TA 2019 s.d. Semester I TA 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
9	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait lainnya
10	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 TA 2021 pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
11	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah TA 2020 s.d. TA 2021 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
12	Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing TA 2020 dan TA 2021 (semester I) pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi terkait lainnya di jakarta
13	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis TA 2020 s.d. 2021 (semester I) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
14	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Bidang Jalan, Kelengkapan Jalan, Penerangan dan Sarana Umum Jalan TA 2021 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
15	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kabupaten Adm Kep Seribu TA 2021 pada Pemprov DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kep Seribu
16	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa dan belanja Modal TA 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
17	Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2020

Profil Entitas Pemeriksaan

Provinsi DKI Jakarta



Luas Wilayah	: 7.659,02 km ²
Ibu Kota	: Kota Jakarta Pusat
Jumlah Penduduk	: 11.100.929 jiwa
Kepadatan Populasi	: 16.718/km ²
Wilayah Administrasi	: 5 Kota (Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Barat), 1 Kabupaten (Kabupaten Kepulauan Seribu), 44 Kecamatan, dan 267 Desa/Kelurahan
Website	: https://jakarta.go.id

Pimpinan Daerah

Gubernur	: Anies Rasyid Baswedan, Ph.D .
Wakil Gubernur	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A.
Sekretaris Daerah (Plt.)	: H. Marullah Matali, Lc., M.Ag.
Ketua DPRD	: H. Prasetyo Edi Marsudi, S.H.

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta



Nama BUMD	:	PD Air Minum Jaya (PAM Jaya)
Badan Hukum	:	Perusahaan Daerah
Bidang Usaha	:	Jasa Pelayanan Penyediaan Air Bersih Hasil Usaha
Hasil Usaha	:	Penyediaan Air Bersih di DKI Jakarta
Alamat	:	Jl. Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat, 10210
Telepon	:	(021) 5704250
Faximile	:	(021) 5711796
Email	:	binagram@pamjaya.co.id
Website	:	www.pamjaya.co.id
Tanggal Pendirian	:	30 April 1977
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1977 Perda DKI Jakarta No. 13 Tahun 1992
Tujuan Pendirian	:	Untuk memberikan pengelolaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta
Total Aset	:	Rp2.250,16 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Badan Pengawas	:	Ahmad Ridwan Dalimunthe (Ketua) Agustino Darmawan (Sekretaris) Hartono (Anggota)
Direksi	:	P.Bambang Hernowo (Direktur Utama) Untung Suryadi (Direktur Umum) Sutan Maizon Rusdi (Direktur Umum) Barce Simarmata (Direktur Teknik) Untung Suryadi (Direktur Teknik) Syahrul (Direktur Pelayanan)
Jumlah Karyawan	:	2.079 orang
Aktivitas	:	Penyedia air bersih, penyaluran air bersih, pembangunan infrastruktur air bersih mengalir

BANK DKI

Nama BUMD	:	PT Bank DKI
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	:	Perbankan
Hasil Usaha	:	Jasa Perbankan
Alamat	:	Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10130 Indonesia
Telepon	:	(021) 806 55555
Faximile	:	(021) 806 55000
Email	:	corsec@bankdki.co.id
Website	:	www.bankdki.co.id
Tanggal Pendirian	:	11 April 1961
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 15 Tahun 2014 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2012 Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 1999
Tujuan Pendirian	:	Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup
Total Aset	:	Rp63.046 (Dalam Miliar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Lukman Hakim (Plt. Komisaris Utama – Komisaris Independen) Edy Sumantri (Komisaris)
Direksi	:	Fidri Arnaldy (Direktur Utama) Ateng Rivai (Direktur Kepatuhan) Amirul Wicaksono (Direktur Teknologi & Operasional) Romy Wijayanto (Direktur Keuangan) Babay Parid Wazdi (Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah)
Jumlah Karyawan	:	3.494 orang
Aktivitas	:	Kegiatan operasional bank, call center, operasional IT



Nama BUMD	:	Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
Badan Hukum	:	Perusahaan Daerah
Bidang Usaha	:	Jasa Perpasaran
Hasil Usaha	:	Pengelola pasar, property, dan pengembangan bisnis
Alamat	:	Gedung PD. Pasar Jaya, Jl. Cikini Raya No. 90, Jakarta Pusat, 10330
Telepon	:	(021) 213 90606
Faximile	:	(021) 213 90650
Email	:	info@pasarjaya.co.id
Website	:	www.pasarjaya.co.id
Tanggal Pendirian	:	24 Desember 1966
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2018 Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2018
Tujuan Pendirian	:	Untuk melakukan pengelolaan area pasar, pembinaan pedagang dan menjaga stabilitas harga barang
Total Aset	:	Rp4.785,26 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Badan Pengawas	:	Rikrik Rizkiyana (Ketua) Sutrisno Muslimin (Sekretaris)
Direksi	:	Arief Nasrudin (Direktur Utama) Ratih Mayasari (Direktur Keuangan dan Administrasi) Aristianto (Direktur Teknik) Anugrah Esa (Direktur Usaha dan Pengembangan)
Jumlah Karyawan	:	3.805 orang
Aktivitas	:	Menyediakan tempat transaksi jual-beli, pengurusan dan kelolaan area pasar, menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi


SARANA JAYA

Nama BUMD	:	Perumda Pembangunan Sarana Jaya
Badan Hukum	:	Perusahaan Daerah
Bidang Usaha	:	Property & Development
Hasil Usaha	:	Kavling tanah matang dan bangunan umum
Alamat	:	Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 352 2667
Faximile	:	(021) 386 3960, 385 961, 352 2569
Email	:	cs.pdpsj@sarana-jaya.co.id
Website	:	www.sarana-jaya.co.id
Tanggal Pendirian	:	20 Maret 1982
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 1982 Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1990 Perda DKI Jakarta No. 11 Tahun 2018
Tujuan Pendirian	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tanah, pembangunan perumahan, pemukiman, bangunan umum dan komersil berikut prasarana, sarana utilitas serta fasilitasnya dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan mampu menjadi entitas bisnis yang menguntungkan
Total Aset	:	Rp5.820,81 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Nurdin Sobari (Ketua Dewan Komisaris) Hasreiza (Sekretaris Dewan Komisaris) Taridi Kasbi Ridho (Sekretaris Dewan Komisaris)
Direksi	:	Agus Himawan Widiyanto (Direktur Utama) Bima P Santosa (Direktur Administrasi & Keuangan) Indra S Arharrys (Direktur Pengembangan)
Jumlah Karyawan	:	110 orang
Aktivitas	:	Penyediaan tanah, pembangunan perumahan dan bangunan umum, pembangunan kawasan industri dan sarana-prasarana



Nama BUMD	: Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta (PD PAL JAYA)
Badan Hukum	: Perusahaan Daerah
Bidang Usaha	: Jasa pelayanan penyaluran dan pengumpulan air limbah melalui sistem perpipaan, sistem setempat serta pengolahannya
Hasil Usaha	: Mengolah air limbah sampai memenuhi kualitas sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan
Alamat	: Jl. Sultan Agung No. 1 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon	: (021) 835 4252 / (021) 835 4253
Faximile	: (021) 830 1470
Email	: bpaljaya@paljaya.com
Website	: www.paljaya.com
Tanggal Pendirian	: 26 September 1991
Dasar Hukum	: Perda DKI Jakarta No. 10 Tahun 1991 Perda DKI Jakarta No. 14 Tahun 1997 Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2014
Tujuan Pendirian	: Membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahannya
Total Aset	: Rp706,08 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Badan Pengawas	: Andi Syahputra (Ketua) Tate Qomaruddin (Sekretaris) Darwis M. Adji (Anggota)
Direksi	: Aris Surpiyanto (Direktur Utama) Erwin Marphy Ali (Direktur Teknik & Usaha) Budi Setyono (Direktur Administrasi & Keuangan)
Jumlah Karyawan	: 111 orang



DHARMA JAYA

Nama BUMD	:	PD Dharma Jaya
Badan Hukum	:	Perusahaan Daerah
Bidang Usaha	:	Perdagangan dan industri daging
Hasil Usaha	:	Jasa Pemotongan hewan, perdagangan daging, dan ternak
Alamat	:	Jl. Penggilingan Raya No. 25, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 4609193 / 085939-937317
Faximile	:	(021) 4613015
Email	:	info@dharmajaya.co.id
Website	:	www.dharmajaya.co.id
Tanggal Pendirian	:	24 Desember 1966
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1985 Perda DKI Jakarta No. 11 Tahun 2013
Tujuan Pendirian	:	Membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus produk hewani dan petani ternak
Total Aset	:	Rp342.824,08 (Dalam Juta Rupiah) (Tahun 2020)
Badan Pengawas	:	Wildan Syukri Niam (Ketua) Salman Dianda Anwar (Sekretaris) Hidayatulloh (Anggota)
Direksi	:	Raditya Endra Budiman (Direktur Utama) Mohamad Adam Ali Bhutto (Direktur Usaha) Hendrizal Adnan (Direktur Administrasi & Keuangan)
Jumlah Karyawan	:	244 orang
Aktivitas	:	Penampungan dan penggemukan sapi, pembuatan pupuk kompos, pemotongan hewan, penggemukan dan pengemasan daging, serta <i>meatshop</i>



Nama BUMD	:	PT Jakarta Propertindo
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	:	Properti, utilitas, mobilitas, energi, ICT, dan konsultansi
Hasil Usaha	:	Pengembangan properti, utilitas, mobilitas, energi, ICT, dan jasa konsultansi
Alamat	:	Gedung Thamrin City Lantai 1, Jl. Thamrin Boulevard Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 29625700
Faximile	:	(021) 29625708
Email	:	info@jakarta-propertindo.com
Website	:	www.jakarta-propertindo.com
Tanggal Pendirian	:	3 September 1997
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2004
Tujuan Pendirian	:	Meningkatkan aspek livability, meningkatkan dan menjaga kesehatan finansial perusahaan, memberikan dukungan kepada Pemerintah DKI Jakarta, dan mencapai pembangunan berkelanjutan
Total Aset	:	Rp20.406,50 (Dalam Miliar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Hamdan Zoelva (Komisaris Utama) Daryanto (Komisaris) Hadi Prabowo (Komisaris) Yusmada Faizal (Komisaris) Nurmansjah Lubis (Komisaris)
Direksi	:	Dwi Wahyu Daryoto (Direktur Utama) Yuliantina Wangsawiguna (Direktur Keuangan) Muhammad Hanief Arie Setianto (Direktur Pengembangan Bisnis) Muhammad Taufiqurrachman (Direktur Operasional) M Aprindy (Direktur Pengelolaan Aset)
Jumlah Karyawan	:	214 orang
Aktivitas	:	Pengembangan properti, utilitas, mobilitas, energi, ICT, dan jasa konsultansi



Nama BUMD	:	PT Jakarta Tourisindo (JakTour)
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	:	Industri Pariwisata
Hasil Usaha	:	Jasa Perhotelan, Usaha Pondok Wisata, dan Biro Wisata
Alamat	:	Hotel Grand Cempaka Jakarta Lantai 2, Jl. Let. Jend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
Telepon	:	(021) 426 6535 / (021) 426 5568
Faximile	:	(021) 426 5567
Email	:	jaktour@jakartatourisindo.com
Website	:	www.jakartatourisindo.com
Tanggal Pendirian	:	17 September 2004
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014
Tujuan Pendirian	:	Melakukan usaha di bidang Industri Pariwisata dan Usaha Penyediaan Akomodasi serta usaha-usaha penunjang lain yang menghasilkan jasa penyedia sarana pariwisata yang berstandar nasional maupun internasional serta memiliki daya saing kuat dengan industri sejenis untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas
Total Aset	:	Rp614.433,57 (Dalam Juta Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Budi Siswanto (Komisaris Utama) Tatat Rahmita Utami (Komisaris)
Direksi	:	Novita Dewi (Direktur Utama) Zulfarshah (Direktur Keuangan & Administrasi)
Jumlah Karyawan	:	418 orang



Nama BUMD	:	PT Food Station Tjipinang Jaya
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	:	Jasa / Perdagangan
Hasil Usaha	:	Penyewaan gudang, pasar dan perdagangan
Alamat	:	Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jl. Pisangan Lama Selatan No. 1, Pisangan Timur, Pologadung, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 489 7208 / (021) 489 7272
Faximile	:	(021) 471 7994 / (021) 478 6561
Email	:	pusat@foodstation.co.id
Website	:	www.foodstation.co.id
Tanggal Pendirian	:	28 April 1972
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 2014
Tujuan Pendirian	:	Memenuhi ketersediaan bahan pangan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta; Menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pangan di Provinsi DKI Jakarta; Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah; Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
Total Aset	:	Rp696.778,4 (Dalam Juta Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Sudirman Said (Komisaris Utama) Abdul Rahman Kadir (Komisaris)
Direksi	:	Pamrihardi Wiraryo (Direktur Utama) Budi Santoso (Direktur Keuangan dan Umum) Andre Maulana (Direktur Umum)
Jumlah Karyawan	:	226 orang
Aktivitas	:	Penyewaan gudang, pasar dan perdagangan

**JAYA ANCOL**
PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk

Nama BUMD : PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk

Badan Hukum : Perseroan Terbatas

Bidang Usaha : Pembangunan (Real Estate) dan Jasa Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pembangunan serta di Bidang Usaha Kawasan Pariwisata (Rekreasi), Perhotelan dan Sarana Olahraga melalui Anak Usaha

Alamat : Gedung Ecovention Building, Jl. Lodan Timur No. 7, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta 14430

Telepon : (021) 292 22222 / (021) 645 3456

Faximile : (021) 647 10502

Email : investor@ancol.com

Website : www.ancol.com

Tanggal Pendirian : 10 Juli 1992

Dasar Hukum : Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 1991
Perda DKI Jakarta No. 16 Tahun 2014

Tujuan Pendirian : Berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa

Total Aset : Rp4.042,61 (Dalam Miliar Rupiah) (Tahun 2020)

Dewan Komisaris : Rene Suhardono Canoneo (Komisaris Utama & Independen)
Trisna Muliadi (Komisaris)
Geisz Chalifah (Komisaris)

Direksi : Teuku Sahir Syahali (Direktur Utama)
Hari Sundjojo(Direktur Keuangan)
Agus Sudarno (Direktur Rekreasi & Pengembangan)
Bertho Darmo Poedjo Asmanto (Direktur Properti, Retail dan Resort)
Febrina Intan (Direktur Marketing)

Jumlah Karyawan : 297 orang



increasing mobility, improving life quality

Nama BUMD	: PT Mass Rapid Transit Jakarta
Badan Hukum	: Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	: Pengadaan dan Pengelolaan Transportasi Bawah Tanah
Hasil Usaha	: Jasa Transportasi
Alamat	: Wisma Nusantara Lt. 21-23, Jl. MH Thamrin 59, Jakarta 10350
Telepon	: (021) 390 6454 / (021) 310 3629
Faximile	: (021) 315 5846
Email	: info@jakartamrt.co.id
Website	: www.jakartamrt.co.id
Tanggal Pendirian	: 17 Juni 2008
Dasar Hukum	: Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2008 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2013 Perda DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018
Tujuan Pendirian	: Menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan layanan transportasi
Total Aset	: Rp18.397,15 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	: M. Syauqi (Komisaris Utama) Rukijo (Komisaris) Zulfikri (Komisaris) Mukhtasor (Komisaris) Adnan Pandu Praja (Komisaris)
Direksi	: Wiliam P. Sabandar (Direktur Utama) Muhammad Effendi (Direktur Operasional dan Pemeliharaan) Farchad H. Mahfud (Direktur Pengembangan Bisnis) Silvia Halim (Direktur Konstruksi) Roy Rahendra (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi)
Jumlah Karyawan	: 676 orang
Aktivitas	: Pengadaan dan Pengelolaan Transportasi Bawah Tanah, Menyediakan sarana dan sarana angkutan massal menggunakan MRT



Nama BUMD	: PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
Badan Hukum	: Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	: Pengelola Kawasan Industri
Hasil Usaha	: Menyediakan tanah kavling industri dan semua fasilitas industri yang tertata baik, sewa bangunan, pergudangan, transit warehouse, sarana usaha industri kecil, serta bangunan pendukung lainnya
Alamat	: Jl. Pulokambing No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur
Telepon	: (021) 460 0305 / (021) 460 0730
Faximile	: (021) 460 0730
Email	: jiep@jiep.co.id
Website	: www.jiep.co.id
Tanggal Pendirian	: 26 Juni 1973
Dasar Hukum	: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1973 SK Gubernur DKI Jakarta No. D.V-a 3/2/36/1973
Tujuan Pendirian	: Penyedia kawasan dan jasa pengelolaan yang menjadi pilihan utama komunitas industri
Total Aset	: Rp800,26 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	: Yurianto (Komisaris Utama) Sandra Firmania (Komisaris Ketua Komite Risiko) Bambang J.Pramono (Komisaris Ketua Komite Audit)
Direksi	: Landi Rizaldi Mangaweang (Direktur Utama) Beta Sri Winarto (Direktur Operasional dan Pengembangan) Arief Adhi Sanjaya (Direktur Keuangan)
Jumlah Karyawan	: 139 orang
Aktivitas	: Menyediakan tanah kavling industri, sewa bangunan, pergudangan, transit warehouse, sarana usaha industri kecil, serta bangunan pendukung lainnya



Nama BUMD	:	PT Transportasi Jakarta
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	:	Jasa Transportasi
Hasil Usaha	:	Layanan Masyarakat
Alamat	:	Jl. Mayjen Soetoyo No. 1, Cawang, Jakarta Timur
Telepon	:	(021) 808 79449
Faximile	:	(021) 808 79453
Email	:	info@transjkarta.co.id
Website	:	www.transjakarta.co.id
Tanggal Pendirian	:	27 Maret 2014
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2014 Perda DKI Jakarta No. 17 Tahun 2014
Tujuan Pendirian	:	Melakukan usaha di bidang pengoperasian sistem Bus Rapid Transit serta usaha-usaha penunjang lain yang berstandar nasional maupun internasional serta memiliki daya saing kuat dengan industri sejenis
Total Aset	:	Rp7.067,15 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Jaswandi (Komisaris Utama) Syafi'i (Komisaris) Syarifuddin (Komisaris) Beni Edmunandar (Komisaris) Rustam Effendi (Komisaris)
Direksi	:	Sardjono Jhony Tjitrokusumo (Direktur Utama) Prasetia Budi (Direktur Operasional) Achmad Izzul Waro (Direktur Pelayanan dan Pengembangan) Welfizon Yuza (Direktur Keuangan) Yoga Adiwinarto (Direktur Teknik dan Fasilitas)
Jumlah Karyawan	:	6.125 orang
Aktivitas	:	Jasa transportasi, layanan masyarakat, menyediakan sarana dan angkutan umum massal menggunakan bus



Nama BUMD	:	PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (PT Jamkrida Jakarta)
Badan Hukum	:	Perseroan Terbatas
Bidang Usaha	:	Penjaminan Kredit
Hasil Usaha	:	Jaminan Kredit Daerah
Alamat	:	Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 14, Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, 10160
Telepon	:	(021) 212 03204 / (021) 212 03206
Faximile	:	(021) 223 46335
Email	:	mail@jamkrida-jakarta.co.id
Website	:	www.jamkrida-jakarta.co.id
Tanggal Pendirian	:	10 November 2014
Dasar Hukum	:	Perda DKI Jakarta No. 13 Tahun 2013 Izin Usaha OJK No. KEP-62/D.05/2015 tanggal 15 Mei 2015
Tujuan Pendirian	:	Memberikan jasa penjaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Total Aset	:	Rp514,58 (Dalam Milyar Rupiah) (Tahun 2020)
Dewan Komisaris	:	Arief Goentoro (Komisaris Utama)
Direksi	:	Chusnul Ma'arif (Direktur Utama) Arief Goentoro (Komisaris Utama) Indra Setiawan (Komite Audit) A. Ivan S. Soepamo (Direktur Utama) Imam Wahyudi (Direktur) Masykuri Abdillah (Ketua DPS) Euis Amalia (Anggota DPS)
Jumlah Karyawan	:	53 orang
Aktivitas	:	Penjaminan kredit, Pembiayaan atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang mempunyai Unit Usaha Simpan Pinjam kepada anggotanya, dan Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan



Penghargaan yang Telah Diraih





Dokumentasi Kegiatan

Januari 2021



Upacara Virtual HUT BPK



Februari 2021



Acara Peresmian Ruangan Baru

Pengarahan dari Anggota V dan Auditor Utama KN V BPK RI





Maret 2021

Penyerahan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah DKI Jakarta



SERAH TERIMA LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TA 2020

Tes Rapid Antigen untuk
lingkungan kantor



Rapat Zona Integritas

April 2021

Pemberian Materi
pada Diklat CPNS



Acara Buka Puasa Bersama
Anggota V BPK RI



Pelantikan Jabatan
Fungsional





Mei 2021



Juni 2021





September 2021



Oktober 2021





November 2021



Desember 2021





BPK RI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





BPK RI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

